



**LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM/
KEGIATAN PEMBANGUNAN APBD
PROVINSI SUMATERA SELATAN
BULAN JANUARI, FEBRUARI, MARET
(TRIWULAN I)
TAHUN ANGGARAN 2026**

**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK (DPPPA)
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

Jalan Ade Irma Suryani Nasution No.1254
Palembang
Telpon/Fax (0711) 314004
Email dp3asumsel@gmail.com
Website dp3asumsel@sumselprov.go.id

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Daftar Isi	ii
I PENDAHULUAN	1
a. Gambaran Umum Perangkat Daerah	1
1. Tujuan;	2
2. Sasaran;	2
3. Belanja, Program APBD :	6
a) Belanja Perangkat Daerah;	6
b) Program dan Anggaran APBD;	6
4. Indikator Kinerja Perangkat Daerah (Renstra) dan Indikator Kinerja Daerah (RPJMD);	11
5. Kegiatan Perangkat Daerah berdasarkan kewilayahan (lokasi).	14
b. Latar Belakang Penyusunan Laporan	20
1. Maksud;	20
2. Tujuan.	20
II EVALUASI KINERJA PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN APBD SAMPAI BULAN JUNI TAHUN 2026	21
a. Realisasi Belanja APBD	21
1. Realisasi Total Belanja Daerah	21
2. Realisasi Belanja Operasi	21
3. Realisasi Belanja Modal	22
b. Indikator Kinerja OPD	28
c. Penghargaan yang diperoleh Perangkat Daerah Tahun 2025	27
III KENDALA YANG DIHADAPI DAN SARAN TINDAK LANJUT	28
IV PENUTUP	29
LAMPIRAN	
Tabel Realisasi Pelaksanaan Program/Kegiatan Pembangunan APBD Bulan Januari, Februari, Maret Tahun 2026	

LAPORAN PELAKSANAAN
PROGRAM/KEGIATAN PEMBANGUNAN APBD
PROVINSI SUMATERA SELATAN
TRIWULAN I TAHUN ANGGARAN 2026
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
PROVINSI SUMATERA SELATAN

I. PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum OPD

Sesuai dengan **UU Nomor 23 Tahun 2014** tentang Pemerintah Daerah, urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak merupakan urusan wajib non pelayanan dasar dengan **6 (enam) sub urusan**, yaitu :

1. Kualitas Hidup Perempuan

Dengan kewenangan :

- a) **Pelebagaan** Pengarustamaan Gender (PUG) pada lembaga pemerintah tingkat daerah provinsi.
- b) **Pemberdayaan perempuan** bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan tingkat daerah provinsi.
- c) **Penguatan dan pengembangan** lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan tingkat daerah provinsi.

2. Perlindungan Perempuan

Dengan kewenangan :

- a) **Pencegahan kekerasan** terhadap perempuan yang melibatkan para pihak lingkup daerah provinsi dan lintas daerah kabupaten/kota.
- b) **Penyediaan layanan** rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat daerah provinsi dan lintas daerah kabupaten/kota.
- c) **Penguatan dan pengembangan** lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat daerah provinsi.

3. Kualitas Keluarga

Dengan kewenangan :

- a) **Peningkatan** kualitas keluarga dalam mewujudkan KG (Kesetaraan Gender) dan hak anak tingkat daerah provinsi dan lintas daerah kab/ kota.
- b) **Penguatan dan pengembangan** LPLPKK (Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga) dalam mewujudkan KG (Kesetaraan Gender) dan hak anak yang wilayah kerjanya lintas daerah kab/ kota.
- c) **Penyediaan layanan** bagikeluarga dalam mewujudkan KG (Kesetaraan Gender) dan hak anak yang wilayahkerjanya lintas daerah kab/kota.

4. Sistem Data Gender dan Anak

Dengan kewenangan :

Pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data di tingkat daerah provinsi.

a. Pemenuhan Hak Anak

Dengan kewenangan :

- a) **Pelembagaan** PHA (Pemenuhan Hak Anak) pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha tingkat daerah provinsi.
- b) **Penguatan dan Pengembangan** lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat daerah provinsi dan lintas kabupaten/kota.

b. Perlindungan Khusus Anak

Dengan kewenangan :

- a) **Pencegahan** kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah provinsi dan lintas daerah kabupaten/kota.
- b) **Penyediaan layanan** bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah provinsi.
- c) **Penguatan dan pengembangan** lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah provinsi dan lintas kabupaten/kota.

VISI SUMSEL Tahun 2025 – 2029

”SUMSEL MAJU TERUS UNTUK SEMUA”

- Sumsel sebagai Provinsi yang maju ekonominya, berbasiskan pengetahuan dan inovasi yang berakar pada budaya Nusantara. Sumsel menjadi Provinsiberdaya saing, modern, Tangguh, inovatif dan adil
- Sumsel sebagai Provinsi yang berkomitmen untuk terus menerapkan prinsip Pembangunan Berkelanjutan, pertumbuhan ekonomi yang tinggi seimbang dengan pembangunan sosial, berkelanjutan sumberdaya alam dan kualitas lingkungan hidup, serta tata Kelola yang baik.

MISI

1. Mewujudkan masyarakat Sumatera Selatan yang berkualitas, sehat, cerdas, inovatif, produktif, berakhlak, berkeadilan dan berkeadaban melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan dan kemampuan sumberdaya yang berdayasaing.
2. Mewujudkan Ketahanan ekonomi berbasis sumber daya lokal dan berkelanjutan dalam kerangka ekonomi kerakyatan yang berkeadilan untuk meningkatkan pendapatan Masyarakat.
3. Mewujudkan keterkaitan (nexus) yang kuat antara ketahanan pangan, ketahanan energi, dan kedaulatan air sebagai upaya mengatasi perubahan iklim.
4. Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang terintegrasi antar kabupaten/kota dan pelayanan dasar yang berkualitas dan rumah lingkungan.
5. Memperluas kesempatan berusaha dan lapangan kerja serta perlindungan sosial yang terjaga untuk menurunkan angka kemiskinan.
6. Meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik berbasis digital, menuju pelayanan publik yang berkualitas.
7. Mewujudkan kehidupan beragama, seni dan budaya dalam masyarakat yang menjunjung tinggi toleransi dan berorientasi pada kearifan lokal.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai Organisasi Perangkat Daerah mendukung terwujudnya Visi dan Misi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 yaitu : **“Sumsel Maju Terus Untuk**

Semua” dengan mendukung pencapaian misi ke-1 yaitu : Mewujudkan masyarakat Sumatera Selatan yang berkualitas, sehat, cerdas, inovatif, produktif, berakhlak, berkeadilan dan berkeadaban melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan dan kemampuan sumber daya yang berdaya saing, dengan tujuan Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia dan sasaran Meningkatnya Kesenjangan Gender dan Meningkatnya Upaya Perlindungan Anak.

1. TUJUAN

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan mempunyai tujuan jangka menengah, sebagai berikut ;

Meningkatkan Kesenjangan Gender dan Perlindungan Anak

2. SASARAN

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan mempunyai sasaran sebagai berikut ;

- 1. Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan
- 2. Meningkatnya Pemenuhan Hak dan Perlindungan Khusus Anak
- 3. Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak

3. BELANJA PROGRAM APBD

a. Belanja Perangkat Daerah

Pagu Anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan yang bersumber dari dana APBD Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2026 yaitu :

Belanja Daerah	: Rp. 12.990.005.660,-
Belanja Operasi	: Rp. 12.618.755.660,-
Belanja Pegawai	: Rp. 7.787.255.564,-
➤ Belanja Barang dan Jasa	: Rp. 4.831.500.096,-
➤ Belanja Modal	: Rp. 371.250.000,-
➤ Belanja Modal Peralatan dan Mesin	: Rp. 371.250.000,-

b. Program dan anggaran APBD ;

Belanja tersebut terdiri atas 7 Program, 22 Kegiatan dan 39 Sub Kegiatan, dengan program antara lain sebagai berikut :

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi

- i. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah
- ii. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 3. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 4. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 5. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- iii. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 6. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
- iv. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 7. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 8. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
- v. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 9. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 10. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 11. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 12. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 13. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 14. Fasilitas Kunjungan Tamu
 15. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- vi. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 16. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 17. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
 18. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- vii. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

19. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 20. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya
- 2) Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan
- viii. Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi
 21. Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi
 - ix. Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi
 22. Sosialisasi pemberdayaan perempuan di bidang politik atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Provinsi
 23. Peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Provinsi
 - x. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi
 24. Pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan provinsi
 25. Advokasi dan Sosialisasi Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi.
- 3) Program Perlindungan Perempuan
- xi. Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
 26. Advokasi dan Sosialisasi pencegahan KtP dan TPPO kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Provinsi

- xii. Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
 - 27. Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
 - 28. Layanan Pengaduan atau Penjangkauan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten / Kota
 - xiii. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi
 - 29. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi
- 4) Program Peningkatan Kualitas Keluarga
 - xiv. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi
 - 30. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan
 - xv. Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota
 - 31. Layanan Bimbingan Masyarakat Keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten / Kota
- 5) Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak
 - xvi. Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi
 - 32. Penguatan dan peningkatan kualitas data kekerasan terhadap perempuan dan anak hasil pencatatan dan pelaporan melalui SIMFONI PPA

- 33. Penyediaan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Provinsi
- 6) Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
 - xvii. Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi
 - 34. Advokasi dan Sosialisasi pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi
 - xviii. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi
 - 35. Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak
- 7) Program Perlindungan Khusus Anak
 - xix. Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
 - 36. Advokasi dan Sosialisasi pencegahan KtA kepada Pengambil Kebijakan dan Pemangku kepentingan Kewenangan Provinsi
 - xx. Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi
 - 37. Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
 - 38. Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
 - xxi. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
 - 39. Peningkatan Kapasitas SDM Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan dan Penanganan bagi AMPK Kewenangan Provinsi

4. Indikator Kinerja Perangkat Daerah (RENSTRA) dan Indikator Daerah (RPJMD)

Berdasarkan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan 2025 - 2029, Indikator Kinerja Utama yaitu :

Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2026
Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks	0,453
	Indeks pembangunan Gender (IPG)	Indeks	93,99 – 94,10
	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	Persen	57,30
Meningkatnya Pemenuhan dan Perlindungan Hak Anak	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Indeks	66,00
Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak	Persentase Kasus Kekerasan terhadap perempuan yang diselesaikan	Persen	100
	Persentase Kasus Kekerasan terhadap anak yang di selesaikan	Persen	100

Berdasarkan RPJMD 2025 – 2029 yang menjadi tugas urusan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan Pada Tahun 2025 - 2029 yaitu:

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Capaian Setiap Tahun				
			2025	2026	2027	2028	2029
1	Tingkat Partisipasi angkatan kerja Perempuan	Persen	57,12	57,30	57,50	58,00	58,50
2	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks	0,465	0,453	0,441	0,428	0,416
3	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	93,93-93,99	93,99-94,10	94,07-94,18	94,13-94,21	94,19-94,29
4	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Indeks	64,00	66,00	68,00	70,00	72,00

5. Kegiatan Perangkat Daerah Berdasarkan Kewilayahan (Lokasi).

Berdasarkan kewilayahan, Program/Kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan tersebar di beberapa lokasi, antara lain sebagai berikut :

- 1) Kab. Muara enim
- 2) Kab. OKI
- 3) Kab. OKUT
- 4) Kabupaten Lahat
- 5) Kabupaten OKU Selatan
- 6) Kabupaten Banyuasin
- 7) Kabupaten Musi Banyuasin (Muba)
- 8) Kota Pagar Alam
- 9) Kota Prabumulih
- 10) Kabupaten Ogan Ilir
- 11) Kota Lubuk Linggau
- 12) Kabupaten Empat Lawang
- 13) Kabupaten PALI
- 14) Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara)
- 15) Kabupaten Musi Rawas
- 16) Kabupaten OKU
- 17) Kota Palembang
- 18) Lintas Provinsi

B. Latar Belakang Penyusunan Laporan

i. Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan penyusunan laporan ini adalah memenuhi amanat Surat Edaran Gubernur Nomor : 027/SE/BAPPEDA/2018 tentang Pedoman Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2018. Dalam rangka meningkatkan efektivitas, efisiensi, akuntabilitas serta terciptanya kesinambungan pelaksanaan rencana pembangunan di Provinsi Sumatera Selatan.

ii. Dasar Hukum

Dasar hukum dalam penyusunan Laporan adalah

1. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantu;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan wewenang serta kedudukan Gubernur sebagai wakil Pemerintah di wilayah Provinsi sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan atas peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan wewenang serta kedudukan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi;
7. Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah , serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja pemerintah Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 6 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Povinsi Sumatera Selatan.

II. EVALUASI KINERJA PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN

Hasil evaluasi pelaksanaan program/kegiatan APBD Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2026 sampai dengan Triwulan ini pada Dinas

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan antara lain sebagai berikut :

a. **Perbandingan antara realisasi (keuangan, fisik dan kinerja) dengan target kinerja program/kegiatan yang tercantum pada DPA Perangkat Daerah.**

Uraian	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Keuangan (%)		Fisik (%)	
			Target s.d. Bulan Maret	Realisasi s.d. Bulan Maret	Target s.d. Bulan Maret	Realisasi s.d. Bulan Maret
(1)	(2)	(3)	(4)	(5 = 3/2 *100%)	(6)	(7)
Total Belanja	12.990.005.660,-	2.515.765.576,-	100	19,37	100	20,00
Belanja Operasi	12.618.755.660,-	2.144.589.466,-	100	17,00	100	18,00
- Belanja Pegawai	7.787.255.564,-	1.804.266.773,-	100	23,17	100	28,57
- Belanja Barang dan Jasa	4.831.500.096,-	340.313.693,-	100	7,04	100	8,00
Belanja Modal	371.250.000,-	371.185.110,-	100	99,98	100	100
- Belanja Modal Peralatan dan Perlengkapan Kantor	300.000.000,-	299.949.750,-	100	99,98	100	100
- Belanja Penyediaan Bahan Logistik Kantor	71.250.000,-	71.235.360,-	100	99,98	100	100

1) **Realisasi Total Belanja**

Realisasi Keuangan Total Belanja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan Januari sampai dengan Bulan Maret Tahun Anggaran 2026 dari pagu Rp. **12.990.005.660,-** terealisasi sebesar Rp. **2.515.765.576,-** atau 19,37% dan realisasi fisik 20,00%.

2) **Realisasi Belanja Operasi**

Realisasi Keuangan Belanja Operasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan Januari sampai dengan Maret Tahun Anggaran 2026 dari pagu Rp.**12.618.755.660,-** terealisasi Rp. **2.144.580.466,-** atau 17,00% dan realisasi fisik 100 %, terdiri dari

- Belanja Pegawai Rp.7.787.255.564,- terealisasi Rp.1.804.266.773,- atau 23,17% dan realisasi fisik 28,57 %
- Belanja Barang dan Jasa Rp. 4.831.500.096,- terealisasi Rp.340.313.693,- atau 7,04% dan realisasi fisik 7,15 %

3) Realisasi Belanja Modal

Realisasi Keuangan Modal Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan Januari sampai dengan Maret Tahun Anggaran 2026 dari pagu Rp.**371.250.000,-** terealisasi **Rp. 371.185.110,-** atau **99,98%** dan realisasi fisik 100%, terdiri dari

- Belanja Modal Peralatan dan Perlengkapan Kantor Januari sampai dengan Maret Tahun Anggaran 2026 dari pagu Rp.300.000.000,- terealisasi Rp.299.949.750,- atau 99,98% dan realisasi fisik 100 %
- Belanja Modal Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Anggaran 2026 dari pagu Rp.71.250.000,- terealisasi Rp. 71.235.360 atau 99,98 % dan realisasi fisik 100 %

No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Penyediaan Dana	Lokasi	Target Keuangan (%)	Realisasi		
					Keuangan		Fisik
					(Rp)	%	%
1	2	3	4	6	7	8	9
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	10.051.005.660		47,94	2.383.320.506	23,71	35,47
i	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.000.000		100,00	2.000.000	50,00	60,00
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.000.000	Palembang	100,00	2.000.000	100,00	100,00
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.000.000	Palembang	100,00	0	0,00	20,00
ii	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.932.255.564		42,27	1.804.266.773	22,75	28,45
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.787.255.564	Palembang	41,90	1.804.266.773	23,17	28,57
4	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	110.000.000	Palembang	51,81	0	0,00	0
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	35.000.000	Palembang	94,29	0	0,00	0
iii	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	35.000.000		100,00	0	0,00	0
6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	35.000.000	Palembang	100,00	0	0,00	0
iv	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	85.000.000		100,00	0	0,00	0
7	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	25.000.000	Palembang	100,00	0	0,00	
8	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	60.000.000	Palembang	100,00	0	0,00	0
v	Administrasi Umum Perangkat Daerah	847.582.000		83,19	432.003.245	50,97	65,62
9	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12.000.000	Palembang	41,67	0	0,00	0
10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	300.000.000	Palembang	100,00	299.949.750	99,98	100,00

11	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	71.250.000	Palembang	100,00	71.235.360	99,98	100,00
12	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	150.000.000	Palembang	31,67	43.273.135	28,85	40,00
13	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	35.000.000	Palembang	34,29	11.136.000	31,82	40,00
14	Fasilitasi Kunjungan Tamu	15.000.000	Palembang	33,33	4.510.000	30,07	41,23
15	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	264.332.000	Palembang	100,00	1.899.000	0,72	10,00
vi	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	895.333.152		52,50	82.298.737	9,19	14,40
16	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.000.000	Palembang	100,00	0	0,00	0,00
17	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	249.165.152	Palembang	36,22	30.233.737	12,13	12,13
18	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	642.168.000	Palembang	58,52	52.065.000	8,11	16,67
vii	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	251.834.944		66,02	62.751.751	24,92	24,92
19	penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	220.000.000	Palembang	71,02	62.751.751	28,52	28,52
20	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	31.834.944	Palembang	31,41	0	0,00	0,00
II	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	1.290.000.000		15,89	13.575.010	1,05	3,71
viii	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	120.000.000		18,00	7.677.440	6,40	6,40
21	Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	120.000.000	Palembang	18,00	7.677.440	6,40	6,40
ix	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi KeMasyarakatan Kewenangan Provinsi	125.000.000		12,24	5.897.570	4,72	4,72
22	sosialisasi pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Provinsi	25.000.000	Palembang	0,00	0	0,00	0,00
23	peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Provinsi	100.000.000	Palembang	15,30	5.897.570	5,90	5,90
x	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	1.045.000.000		16,08	0	0,00	0
24	pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan provinsi	45.000.000	Palembang	11,11	0	0,00	0
25	Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan KewenanganProvinsi	1.000.000.000	Palembang	16,31	0	0,00	0
III	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	333.476.000		18,20	33.928.920	10,17	12,24
xi	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	65.000.000		18,00	0	0,00	5,00
26	Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP dan TPPO kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Provinsi	65.000.000	Palembang	18,00	0	0,00	5,00
xii	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	168.476.000		18,39	17.199.710	10,21	15,00
27	Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	100.000.000	Palembang	12,50	0	0,00	15,00

28	Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	68.476.000	Palembang	26,98	17.199.710	25,12	15,00
xiii	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	100.000.000		18,00	16.729.210	16,73	16,73
29	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	100.000.000	Palembang	18,00	16.729.210	16,73	16,73
IV	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	60.000.000		48,89	0	0,00	0
xiv	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	35.000.000		14,29	0	0,00	0
30	peningkatan kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	35.000.000	Palembang	14,29	0	0,00	0
xvi	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	25.000.000		0,00	0	0,00	0
31	Layanan bimbingan masyarakat keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	25.000.000	Palembang	0,00	0	0,00	0,00
V	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	100.000.000		14,05	0	0,00	15,00
xvii	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi	100.000.000		14,05	0	0,00	15,00
32	Penguatan dan peningkatan kualitas data kekerasan terhadap perempuan dan anak hasil pencatatan dan pelaporan melalui Simfoni PPA	50.000.000	Palembang	12,60	0	0,00	15,00
33	Penyediaan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Provinsi	50.000.000	Palembang	15,50	0	0,00	15,00
VI	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	225.000.000		48,89	0	0,00	1,15
xviii	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	75.000.000	Palembang	80,00	0	0,00	0,00
34	Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	75.000.000	Palembang	80,00	0	0,00	0,00
xix	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	150.000.000		33,33	0	0,00	0,00
35	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak	150.000.000	Palembang	33,33	0	0,00	3,33
VII	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	930.524.000		23,13	84.941.140	9,13	14,09
xx	Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	154.000.000		16,23	0	0,00	0,00
36	Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Provinsi	154.000.000	Palembang	16,23	0	0,00	0,00
xxi	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi	341.524.000		28,25	31.441.140	9,21	11,51
37	Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	261.524.000	Palembang	31,15	21.016.000	8,04	10,00
38	Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat	80.000.000	Palembang	18,75	10.425.140	13,03	13,03

	Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota						
xxii	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	435000000		21,55	5.350.000	1,23	16,67
39	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia LayananPenanganan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	435.000.000	Palembang	21,55	5.350.000	1,23	16,67
	Jumlah	12.990.005.660		41,79	2.515.765.576	19,37	21,66

b. Perbandingan antara realisasi dengan target Indikator Kinerja Daerah dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2026 yang tercantum pada Renstra DPPPA Sumsel 2025-2029 :

Indikator Kinerja OPD

Capaian Indikator Renstra Per Maret Tahun 2026 :

Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5
Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks	0.453	0,479	94,57
Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	93.99 – 94,10	93,22	99,24
Tingkat Partisipasi angkatan kerja Perempuan	%	57,30	55,35	96,60
Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Indeks	66.00	69,56	105,39
Persentase Kasus Kekerasan terhadap perempuan yang diselesaikan	%	100	82,00	82,00
Persentase Kasus Kekerasan terhadap anak yang diselesaikan	%	100	83,00	83,00

c. PENGHARGAAN YANG DIPEROLEH PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026

Bulan Januari Sampai dengan Bulan Maret Tahun 2026 belum ada Penghargaan yang diraih oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan

III. KENDALA YANG DIHADAPI DAN SARAN TINDAK LANJUT

Permasalahan yang dihadapi antara lain :

- Kebijakan/Peraturan tentang proses Penatausahaan Keuangan yang berubah/berganti
- Kesiapan PPTK untuk melaksanakan kegiatan belum maksimal
- Adanya Dokumen DPA yang harus direvisi

- Adanya kegiatan mendadak yang tidak terjadwal seperti panggilan acara di kementerian, rapat/pelatihan di provinsi

Tindaklanjut yang diperlukan :

- Koordinasi ke PPTK tentang jadwal kegiatan seluruh program kegiatan sehingga setiap PPTK dapat memperhitungkan pelaksanaan dan penyelesaian pertanggungjawaban kegiatan sesuai dengan kondisi.
- Koordinasi dengan BPKAD mengenai kebijakan penatausahaan keuangan agar setiap proses sesuai dengan peraturan yang ada.
- Meningkatkan kerjasama dan koordinasi dengan stakeholders terkait dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kabupaten/kota dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

IV. PENUTUP

Demikianlah penjelasan kami mengenai program/kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan dalam rangka Laporan Pelaksanaan Program/Kegiatan Pembangunan APBD Provinsi Sumatera Selatan Triwulan I Tahun Anggaran 2026 untuk dapat menjadi bahan evaluasi perencanaan ke depan, selanjutnya **laporan yang lebih terinci menjadi lampiran** pada dokumen ini. Demikian disampaikan untuk dapat dimaklumi dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palembang, April 2026

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK PROVINSI SUMATERA
SELATAN,



Muhammad Zaki Aslam, S.IP., M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP 197306261993111001